

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mengatur segala kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat disuatu daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada suatu daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi yang ada disuatu daerah.

Dalam operasionalnya, pemerintah daerah tidak terlepas dari laporan dari hasil kinerja suatu daerah yang disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja suatu daerah secara keseluruhan. Tujuan utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk pemerintah membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Di Indonesia, akuntansi pemerintahan secara historis belum banyak berkembang sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut catatan sejarah, produk akuntansi pemerintahan Indonesia pertama adalah neraca kekayaan negara yang dikeluarkan tahun 1948. Bentuk akuntabilitas keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda. Mulai akhir tahun 2003, barulah akuntansi pemerintahan mendapat perhatian dan dasar hukum yang menggantikan produk Belanda tersebut yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjadi pijakan penting perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Hingga pada tanggal 13 juni tahun 2005 ditetapkan lah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk sebagai dasar pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah

dan daerah. Kemudian terjadi perubahan dari PP No. 24 tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terjadi beberapa perbaikan dari peraturan terdahulu.

Suatu daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kualitas otonomi daerah untuk efektivitas penyelenggaraan dengan masyarakat menjadi semakin baik. Daerah juga harus menumbuhkan semangat otonomi daerah agar menjadi media bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan serta memperkuat tanggung jawab, agar menjadikan daerah lebih mandiri, maju dan sejahtera.

Pelayanan masyarakat oleh pemerintahan daerah secara keseluruhan memainkan peranan yang vital dalam perekonomian negara. Pemerintah pusat maupun daerah cenderung berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor publik sebagai 'kran' ekonomi, yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik di sektor lain. Dalam kenyataannya, peranan swasta maupun kerja sama publik dengan swasta tidak mengubah porsi ekonomi agensi publik.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas yang dimaksud adalah Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara. Secara umum kinerja pemerintahan lebih sulit untuk dikuantifikasi dibandingkan dengan sektor privat karena sebagian besar hasil kinerja bersifat kualitatif. Hal ini juga dikarenakan entitas pemerintahan yang tujuannya lebih menekankan pada pencapaian kinerja nonkeuangan dibandingkan pencapaian kinerja keuangan.

Kewajiban Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sudah menjadi keharusan serta tanggung jawab sebagai entitas yang mengelola keuangan suatu daerah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Jadi, untuk mengetahui apakah pemerintah daerah sudah mengelola keuangan daerah seperti yang disebutkan. Dilakukanlah pengukuran atau penilaian untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu

organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Alasan yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja pemerintahan terkait dengan tanggung jawabnya dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Organisasi pemerintahan bertanggung jawab atas penggunaan dana dan sumber daya dalam hal kesesuaiannya dengan prosedur, efisiensi, dan ketercapaian tujuan.

Untuk melakukan penilaian kinerja pemerintahan, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau lembaga. Yang mana hasilnya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya. Penggunaan analisis rasio keuangan pada pemerintahan belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan.

Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur, diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Dengan demikian rasio keuangan juga menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu daerah.

Selain berguna sebagai penilaian kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, rasio keuangan daerah juga berguna sebagai alat yang mempermudah masyarakat untuk melihat secara tidak langsung laporan keuangan suatu pemerintahan daerah,

dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengerti dan mengetahui maksud dari tiap pos-pos di laporan keuangan serta keterbatasan ilmu pengetahuan atau pendidikan akan membaca laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penilaian menggunakan rasio keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA (PERIODE 2012-2016)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintahan Daerah wajib mengelola keuangan daerah, secara efektif, efisien, dan akuntabel agar tercapainya kesejahteraan masyarakat suatu daerah.
2. Perlunya evaluasi terhadap laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui kondisi keuangan didalamnya.
3. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat yang mempermudah masyarakat dan penggunaanya dalam melihat laporan keuangan dan keadaan suatu pemerintahan daerah (Provinsi Sumatera Utara).

Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam menilai Kinerja Keuangan Daerah. Dengan digunakannya analisis keuangan tersebut, maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana nantinya akan menggambarkan kinerja keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang kemudian akan menjadi bahasan dan akan dijelaskan didalam skripsi ini. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Efisiensi PAD?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
3. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Efisiensi PAD.
4. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Keserasian.
5. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan menerapkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian, serta rasio pertumbuhan, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dari Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jika ditinjau dari teori rasio keuangan daerah. Yang kemudian sebagai alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Laporan Keuangan terkhusus pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah didalam menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan daerah agar mengetahui seberapa pencapaian selama beberapa periode terakhir sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja keuangannya.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk pembelajaran dalam memecahkan masalah tentang penggunaan rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
- d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui kondisi keuangan pemerintahan daerah khususnya pada laporan realisasi anggaran pemerintahan daerah.